

Analisis Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan

¹Juliana Nasution, ²Hanifah Oktaviani Fakhri, ³Riski Sobari, ⁴Andi Hotmatua Harahap

¹Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{2,3,4}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : juliananasution@uinsu.ac.id, nifah8806@gmail.com, sobaryl707@gmail.com,
andihotmatua404@gmail.com

Corresponding Mail Author : juliananasution@uinsu.ac.id

Abstract : In Indonesia this millennium there have been many established companies and companies, especially in the city of Medan, and companies face stiff competition, even if it is a certain type of company, so that there is often a risk of company bankruptcy. innovative, creative and predictable ideas, the current implementation of good corporate governance (GCG) is highly recommended. Because of this, GCG is becoming more and more popular. Not only popular, but also plays an important role as a reference for the company's image. This research approach is descriptive qualitative research. Once the required information is available, the information is grouped and described based on the nature of the information. This type of data is then analyzed using descriptive methods, namely analyzing theory and connecting it to the problem under study. Factors influencing the implementation of GCG in Medan City for UKM include UKM awareness of the importance of GCG implementation, government regulations regarding GCG implementation, knowledge and skills of UKM regarding GCG implementation and access to finance and other resources needed for GCG implementation. At the same time, the government also requires government regulations designed to implement GCG to ensure compliance. Therefore, this problem can be studied in different ways and with different approaches. A literature study to analyze the level of GCG implementation in small and medium enterprises in Medan City is proposed to investigate various aspects related to GCG.

Key words: *Good Corporate Governance, Implementation.*

I. Pendahuluan

Banyak perusahaan dan usaha telah didirikan di Indonesia milenial ini, terutama di kota Medan, dan perusahaan bisnis harus menghadapi persaingan yang ketat bahkan jika mereka adalah sejenis perusahaan, sehingga risiko bisnis untuk bangkrut sering kali terjadi oleh karena itu diperlukannya ide inovatif, kreatif dan dapat diprediksi, saat ini sangat dianjurkan untuk menerapkan good corporate governance (GCG). Inilah sebabnya

mengapa GCG menjadi semakin populer. Tidak hanya populer, tetapi juga berperan penting sebagai tolok ukur citra perusahaan,

Untuk memastikan kelangsungan hidup UKM di masa depan, kompetensi dan kemandirian manajerial harus diberikan pertimbangan khusus di masa depan. Untuk mencapai kemandirian dan keberhasilan kepemimpinan, pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) terutama berlaku untuk sistem manajemen menengah. GCG ditujukan kepada organisasi atau perusahaan yang telah memiliki struktur yang jelas dan sistem internal yang berkualitas, karena memiliki prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua ukuran perusahaan, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan ketidakberpihakan. konsep manajemen sistematis yang telah diterapkan (Tjondro & Wilopo, 2011). Prinsip ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh UKM dalam mengembangkan usahanya.

Awalnya, tata kelola perusahaan hanya diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat, tetapi karena semakin kompleksnya bisnis di berbagai negara di dunia, negara-negara lain juga segera berkembang terutama Indonesia. Dan kini tata kelola perusahaan tidak lagi menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis, tetapi telah menjadi kebutuhan dan kebutuhan yang esensial, dengan adanya peraturan dan perundang-undangan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, sudah menjadi kebutuhan masyarakat. aturan tata kelola perusahaan bermula dari usulan perbaikan aturan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia mengatur aturan bagi emiten BEI yang mewajibkan penunjukan direktur independen dan pembentukan komite audit. Pada tahun 1998, Corporate Governance (CG) diperkenalkan di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, isu dan praktik GCG telah mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Misalnya, CGPI Awards di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri, merupakan kegiatan tahunan yang diikuti oleh berbagai perusahaan ternama Indonesia (baik swasta maupun BUMN) yang bertujuan untuk memberikan evaluasi dan pengakuan terhadap praktik GCG di BUMN dilakukan oleh perusahaan pemilik.

Artikel ini memiliki beberapa tujuan penelitian. Dari mengidentifikasi permasalahan penerapan GCG di sektor UKM Kota Medan, mengidentifikasi aspek regulasi yang perlu diubah, hingga menganalisis praktik tata kelola perusahaan yang baik di Kota Medan. Kota Medan dipilih sebagai sasaran survei karena terdapat data statistik yang menunjukkan bahwa Kota Medan merupakan salah satu daerah di mana UKM berkembang pesat di Indonesia. Apa saja indikator yang sangat mempengaruhi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada sektor UKM di Kota Medan?

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Governance, terjemahannya adalah aturan yang berbicara tentang tata kelola dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) adalah proses dimana perusahaan (pemegang saham/pemegang saham, badan/dewan direksi, dan direksi) berusaha untuk meningkatkan

kinerja dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka mewujudkan nilai perusahaan jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan lain proses dan struktur yang Anda gunakan untuk kepentingan berdasarkan nilai-nilai hukum dan etika.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis. Tata kelola perusahaan mengatur pembagian tanggung jawab di antara mereka yang memiliki kepentingan dalam kelangsungan hidup perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajer, dan semua anggota non-pemegang saham. *Center for European Policy Study (CEPS)* mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem hak, proses, dan kontrol holistik di dalam dan di luar manajemen perusahaan.

Di Indonesia, implementasi GCG secara umum mengacu pada Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)* tahun 2006 dan pedoman sektoral lainnya. Pedoman ini bukan merupakan aturan legislasi formal yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pelaksanaannya, namun demikian, ini menjadi pedoman penting bagi perusahaan dalam memastikan keberlanjutan perusahaan dalam koridor etika bisnis. Beberapa hal penting yang disajikan dalam pendahuluan tujuan dari pedoman GCG ini antara lain:

1. Untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan melalui sistem manajemen berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
2. Untuk memperkuat fungsi dan independensi masing-masing struktur perusahaan, khususnya, dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.
3. Untuk mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai moral dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan.
4. Untuk mendorong kesadaran atas tanggungjawab sosial perusahaan.
5. Untuk meningkatkan nilai perusahaan untuk pemegang saham dan juga mempertimbangkan pemangku kepentingan lainnya.
6. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah adalah kehadiran UMKM. Dengan adanya UMKM dengan jumlah yang banyak, maka akan membantu penyerapan tenaga kerja dan otomatis akan berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi di daerah tersebut. Kota Medan merupakan kota pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, hal ini menjadikan kota ini sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan bisnis yang pesat dibanding dengan kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Bersumber dari data terakhir Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan menyebut, jumlah UMKM yang dibina Pemkot Medan sekitar 27.000 unit dari total 70.000 unit terdata.

Prinsip GCG dalam (Salim, 2018) antara lain:

1. *Transparency* (Keterbukaan), merupakan keterusterangan dalam hal melaksanakan proses pengambilan keputusan dan juga dalam mengemukakan informasi terkait informasi yang relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas,) merupakan penggambaran sistem, fungsi, struktur dan pertanggungjawaban manajemen inti perusahaan agar terlaksana tata kelola perusahaan yang efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), merupakan kesesuaian atau kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perusahaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan perundang-undangan yang berlaku.
5. *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan), merupakan upaya memperlakukan pemangku kepentingan perusahaan dalam memenuhi hak-hak mereka dengan asas keadilan dan kesetaraan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan GCG Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil survei IICG berupa Corporate Governance Perceptions Index (CGPI) untuk mengukur corporate governance. Alasan penggunaan indeks ini adalah terbatasnya data penelitian tentang praktik corporate governance di perusahaan-perusahaan Indonesia. Indeks ini merupakan satu-satunya indeks yang diterbitkan berdasarkan survei terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dengan menggunakan sarana yang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Praktik tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya melindungi kepentingan investor, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi afiliasi dan pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Menurut Dwiriditjahjono (2009) Berbagai manfaat dan keuntungan yang di peroleh dengan penerapan good corporate governance dapat di sebut antara lain;

1. Penerapan good corporate governance perusahaan dapat meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
2. Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus di tanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
3. Praktik good corporate governance karyawan di tempatkan sebagai salah satu stakeholders, yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan.

Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen

terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Dalam penerapan pengenalan GCG di suatu perusahaan, penting untuk melakukan pengendalian fase yang cermat berdasarkan analisis situasi, situasi, dan status persiapan perusahaan agar pengenalan GCG berjalan lancar. Semua aspek perusahaan didukung. Secara umum, perusahaan yang telah berhasil menerapkan GCG menggunakan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:

1. *awareness building*, *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Hal ini dapat dicapai dengan mencari bantuan dari ahli independen di luar perusahaan. Kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya dan diskusi kelompok.
2. *GCG assessment*, Suatu upaya untuk mengukur atau lebih tepat menggambarkan keadaan perusahaan dalam menentukan GCG-nya saat ini. Langkah ini diperlukan untuk memastikan titik awal implementasi GCG dan mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan untuk membantu implementasi GCG yang efektif. Dengan kata lain, penilaian GCG diperlukan untuk menentukan aspek mana yang perlu mendapat perhatian awal dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencapainya.
3. *GCG manual building*, Langkah selanjutnya dalam evaluasi GCG. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan organisasi Anda dan upaya Anda untuk mengidentifikasi prioritas implementasinya, Anda dapat mempersiapkan untuk menyusun manual atau pedoman implementasi GCG. Persiapan manual dapat dilakukan dengan bantuan ahli independen dari luar. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:
 1. Kebijakan GCG perusahaan
 2. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan.
 3. Pedoman perilaku.
 4. Audit committee charter.
 5. Kebijakan disclosure dan transparansi.
 6. Kebijakan dan kerangka manajemen risiko.
 7. Roadmap implementasi.

Tahapan Implementasi

Tahapan ini terdiri atas 3 langkah utama yaitu:

1. Sosialisasi, berbagai aspek yang relevan dengan penerapan GCG harus disampaikan kepada seluruh perusahaan, terutama terkait dengan pedoman pelaksanaan GCG.

Upaya sosialisasi harus dilakukan oleh tim khusus di bawah pengawasan langsung Direktur Utama atau salah satu direktur yang ditunjuk secara internal sebagai GCG Champion.

2. Implementasi, Kegiatan yang akan dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang dikembangkan. Implementasinya harus pendekatan top-down yang melibatkan dewan dan direksi perusahaan. Penerapannya juga harus mencakup upaya manajemen perubahan untuk memantau proses perubahan yang dipicu oleh penerapan GCG.
3. Internalisasi, adalah fase implementasi jangka panjang. Internalisasi meliputi upaya memperkenalkan GCG ke dalam seluruh proses bisnis operasional perusahaan, serta berbagai aturan operasional. Komitmen ini akan memastikan bahwa penerapan GCG bukan hanya sekedar kepatuhan yang dangkal, tetapi cerminan sejati dari seluruh aktivitas perusahaan.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap yang harus dijalankan dari waktu ke waktu dan secara berkala untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan GCG, melakukan audit implementasi oleh pihak ketiga yang independen untuk menilai GCG yang ada. Ada banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit tersebut, dan ada beberapa perusahaan di Indonesia yang melakukan penilaian. Evaluasi berupa penilaian, audit, atau scoring juga bisa dilakukan diwajibkan, misalnya seperti yang diterapkan di BUMN. Penilaian ini akan membantu perusahaan membongkar ulang kondisi dan keadaan mereka, kinerja mereka dalam menerapkan GCG, dan mencari perbaikan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Setelah data yang dibutuhkan tersedia, data tersebut dikelompokkan dan dideskripsikan berdasarkan tipe datanya. Jenis data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menganalisis teori dan mengaitkannya dengan masalah yang diteliti.

Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian di mana variabel-variabel diukur dan dianalisis secara independen untuk lebih mengidentifikasi variabel yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

Kota Medan di Sumatera Utara merupakan salah satu kota besar yang memiliki jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tinggi. Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM di wilayah ini. Salah satu masalah utama adalah tingkat *penerapan Good Corporate Governance (GCG)* yang rendah dalam operasi mereka. Dalam analisis ini, akan dicari tahu berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan GCG pada UKM di Kota Medan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan GCG pada UKM di Kota Medan antara lain adalah kesadaran para pelaku UKM terhadap pentingnya menjalankan GCG, peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerapkan GCG, pengetahuan dan keterampilan para pelaku UKM tentang cara menerapkan GCG, serta akses ke dana dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG. Kesadaran para pelaku UKM tentang pentingnya menerapkan GCG ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman mereka dengan teknik-teknik mengelola UKM. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan para pelaku UKM mengenai cara menerapkan GCG juga dapat menghambat tingkat penerapan ini. Sementara itu, peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk menerapkan GCG juga ditentukan oleh negara untuk memastikan kepatuhannya.

Tingkat penerapan GCG tergantung pada beberapa faktor, antara lain: prinsip-prinsip GCG, struktur organisasi perusahaan, penggunaan teknologi, serta manajemen keuangan. Oleh sebab itu, masalah ini dapat diselidiki melalui berbagai cara dan pendekatan yang berbeda. Sebuah studi literature tentang analisis tingkat penerapan GCG di Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan disarankan untuk mengkaji berbagai aspek yang berhubungan dengan GCG. Selain itu, survei lapangan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur ataupun teknik observasi dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Hasil dari analisis ini akan membantu untuk menentukan aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki agar tingkat pencapaian GCG di usaha kecil dan menengah di Kota Medan ditingkatkan.

Akses ke dana dan sumber daya lainnya juga berperan penting dalam menentukan tingkat penerapan GCG pada UKM di Kota Medan. Jika UKM tidak memiliki akses ke modal dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menerapkan operasi GCG, ini akan sangat sulit bagi mereka untuk menjalankan prinsip-prinsip ini secara efektif. Dalam kesimpulannya, tingkat penerapan *Good Corporate Governance* pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesadaran para pelaku UKM terhadap pentingnya menjalankan GCG, peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerapkan GCG, pengetahuan dan keterampilan mereka tentang cara menerapkan, dan akses mereka ke dana dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melakukannya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu komponen penting dari sektor ekonomi di Kota Medan. Mereka menyediakan lapangan kerja dan cadangan devisa yang berharga bagi pemerintah. Untuk meningkatkan kinerja, mencapai kesinambungan dan berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi Kota Medan, UKM akan terbantu dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Di Medan terdapat sejumlah organisasi usaha kecil dan menengah yang telah memulai pelaksanaan GCG, tetapi masih ada banyak lagi yang harus ditingkatkan tingkat penerapannya. Untuk menganalisis tingkat penerapan GCG di usaha kecil dan menengah di Kota Medan, jadi harus mulai dengan sebuah studi tentang bagaimana situasi GCG di daerah tersebut. Ini termasuk statistik tentang jumlah perusahaan yang menerapkan praktik GCG. Studi juga harus melibatkan sejumlah diskusi dengan perusahaan jasa

keuangan dan lembaga finansial, organisasi nirlaba, dan organisasi pelanggan untuk mempelajari sejauh mana mereka mendukung adopsi GCG. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi dapat membantu untuk mendorong penerapan GCG di Medan. Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep dasar yang menjadi acuan prinsip-prinsip kinerja perusahaan. GCG diterapkan untuk menjaga agar semua pihak yang berkepentingan didalam suatu perusahaan dapat terpenuhi tujuannya secara optimal. Untuk memastikan penerapan GCG yang efektif di Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan perlu dilakukan analisis mengenai tingkat penerapannya.

Good Corporate Governance adalah cara bagaimana para pemimpin organisasi melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pemegang saham organisasi, karyawan, konsumen, pemasok, dan masyarakat luas. Usaha kecil dan menengah yang beroperasi di Kota Medan harus mengimplementasikan good corporate governance untuk mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Untuk menganalisis tingkat penerapan good corporate governance di usaha kecil dan menengah di Kota Medan, kami harus melihat berbagai struktur, prosedur, dan mekanisme yang telah diterapkan di usaha tersebut.

Struktur untuk good corporate governance di usaha kecil dan menengah di Kota Medan adalah persyaratan agar para pemegang saham mendemonstrasikan komitmen jangka panjang mereka pada usaha. Para pebisnis juga harus mematuhi prinsip independensi dalam setiap tindakan yang diambil. Ini termasuk melakukan riset independen sebelum pengambilan keputusan penting atau memastikan bahwa tokoh tertentu tidak memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan. Struktur ini juga harus melibatkan tim audit intern yang berbeda untuk memeriksa penggunaan sumber daya dan laporan keuangan agar tidak terjadi ketidakjujuran dalam manajemen aset.

Prosedur yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* terutama berfokus pada manajemen risiko. Usaha kecil dan menengah harus beroperasi dalam rentang risiko yang memadai bagi situasi mereka. Mereka juga harus mengimplementasikan prosedur yang akan membantu mereka melacak perubahan dalam pasar yang berpengaruh pada operasi bisnis mereka. Ini juga mencakup mengevaluasi dampak lingkungan dari operasi bisnis mereka. Mekanisme good corporate governance yang digunakan oleh usaha kecil dan menengah di Kota Medan termasuk penyebaran informasi tentang bisnis kepada publik dengan transparansi. Badan usaha umumnya harus membuat daftar produk atau layanan, struktur organisasi, dan proses penyelesaian sengketa yang adil yang tersedia untuk publik.

Usaha juga harus menentukan struktur biaya produk atau layanan dan memberikan informasi tentang biaya yang terlibat agar konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi ini. Ini akan membantu para pebisnis untuk membangun rasa saling percaya dan menciptakan pendekatan yang lebih etis untuk liburan bisnis. Kesimpulannya, usaha kecil dan menengah di Kota Medan dapat memperkuat posisinya dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance seperti struktur, prosedur, dan mekanisme untuk mendemonstrasikan komitmen jangka panjang transitif kepada para pemegang saham dan masyarakat mereka. Hal ini akan memberikan manfaat kepada

seluruh komponen bisnis dengan memberikan pengetahuan tentang bagaimana bisnis tersebut bekerja dengan cara yang etis.

IV. Kesimpulan

Kota Medan di Sumatera Utara merupakan salah satu kota besar yang memiliki jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan GCG pada UKM di Kota Medan antara lain adalah kesadaran para pelaku UKM terhadap pentingnya menjalankan GCG, peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerapkan GCG, pengetahuan dan keterampilan para pelaku UKM tentang cara menerapkan GCG, serta akses ke dana dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG. Sementara itu, peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk menerapkan GCG juga ditentukan oleh negara untuk memastikan kepatuhannya. Oleh sebab itu, masalah ini dapat diselidiki melalui berbagai cara dan pendekatan yang berbeda. Sebuah studi literature tentang analisis tingkat penerapan GCG di Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan disarankan untuk mengkaji berbagai aspek yang berhubungan dengan GCG.

Jika UKM tidak memiliki akses ke modal dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menerapkan operasi GCG, ini akan sangat sulit bagi mereka untuk menjalankan prinsip-prinsip ini secara efektif. Dalam kesimpulannya, tingkat penerapan Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesadaran para pelaku UKM terhadap pentingnya menjalankan GCG, peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerapkan GCG, pengetahuan dan keterampilan mereka tentang cara menerapkan, dan akses mereka ke dana dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melakukannya. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu komponen penting dari sektor ekonomi di Kota Medan.

Mereka menyediakan lapangan kerja dan cadangan devisa yang berharga bagi pemerintah. Di Medan terdapat sejumlah organisasi usaha kecil dan menengah yang telah memulai pelaksanaan GCG, tetapi masih ada banyak lagi yang harus ditingkatkan tingkat penerapannya. Usaha kecil dan menengah yang beroperasi di Kota Medan harus mengimplementasikan good corporate governance untuk mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Untuk menganalisis tingkat penerapan good corporate governance di usaha kecil dan menengah di Kota Medan, kami harus melihat berbagai struktur, prosedur, dan mekanisme yang telah diterapkan di usaha tersebut. Para pebisnis juga harus mematuhi prinsip independensi dalam setiap tindakan yang diambil. Struktur ini juga harus melibatkan tim audit intern yang berbeda untuk memeriksa penggunaan sumber daya dan laporan keuangan agar tidak terjadi ketidakjujuran dalam manajemen aset. Prosedur yang berkaitan dengan good corporate governance terutama berfokus pada manajemen risiko. Usaha kecil dan menengah harus beroperasi dalam rentang risiko yang memadai bagi situasi mereka. Usaha juga harus menentukan struktur biaya produk atau layanan dan memberikan informasi tentang biaya yang terlibat agar konsumen dapat membuat

keputusan berdasarkan informasi ini. Ini akan membantu para pebisnis untuk membangun rasa saling percaya dan menciptakan pendekatan yang lebih etis untuk liburan bisnis.

V. Daftar Pustaka

- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan bagi Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2). <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/2108/1918>.
- Prayogi, Andi, Muhammad, Nasution, Irfan, Muhammad, Nasution, Affandi, Mirsya, Satria. (2017). *Manajemen Usaha Untuk Usaha Mikro & Kecil*. (Cetakan ke-1) . Medan : Umsu press.
- Salim, A. (2018). Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 1(2), 149–176. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ekomadania/article/article/view/3179>.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tjondro, D., & Wilopo, R. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business & Banking (JBB)*, 1(1), 1–14. <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jbb/article/download/148/103>.